

**PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18
TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)**

**Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Fakultas Syariah**

Oleh

**ADJIE ARVINDO
NPM. 1521020004
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18
TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten
Lampung Utara)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Fakultas Syariah

Oleh:

**ADJIE ARVINDO
NPM. 1521020004**

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I

: Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II

: Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, di dalam desa terdapat beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun. Desa Cahaya Makmur merupakan desa pada umum (bukan desa adat), yang terletak di kabupaten Lampung Utara. Konsep pengelolaan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencakup perencanaan, pengorganisasian kelembagaan, penggunaan sumber-sumber daya dan pengawasan. Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Rumusan masalah nya adalah: 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa Cahaya Makmur, 2) Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa di Desa Cahaya Makmur. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan mendeskripsikan konsep kewenangan pemerintahan desa Cahaya Makmur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 18; 2) mengetahui bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap kewenangan di desa Cahaya Makmur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang Pandangan *Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara). Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari *Al-Qur'an*, *Hadist*, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen, serta karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya di analisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa Cahaya Makmur telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti dalam Pasal 18 tentang Kewenangan Desa. Hal tersebut harus dijalankan agar desa Cahaya Makmur menjadi maju dan sejahtera. Ditinjau dari *fiqh siyasah* yang merupakan ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya. Maka jika dilihat dari *fiqh siyasah* pelaksanaan pemerintahan dalam kewenangan desa telah sejalan dan tidak bertentangan, karena pada dasarnya sama-sama untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Adjie Arvindo
NPM	: 1521020004
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PANDANGAN FIQH SIYASAH TRHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2019
Penulis,

Adjie Arvindo
NPM. 1521020004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18
TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan
Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)

Nama : Adjie Arvindo

NPM : 1521020004

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

Marwin, S.H., M.H.

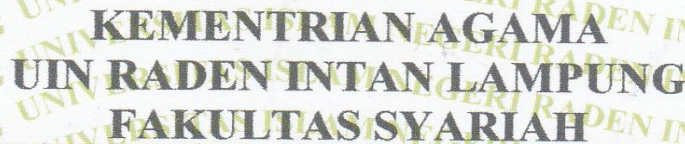
NIP.197009011997031002

NIP.197501292000031001

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

NIP. 197111061998032005



PENGESAHAN

Tim Penguji

Penguji II : Marwin, S.H., M.H.

Dr. H. Chairuddin, M.H.
NIP: 196210221993031002

MOTTO

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنِ تَتَوَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa [4: 58])



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT. serta *Shalawat* teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya. Kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang tercinta dan tersayang, diantaranya:

1. Orang Tua Tercinta, Ayahanda (Alamsyah, S.E.) dan Ibunda (Rahmawati, S.E.) yang telah memberikan kasih sayang, memberi semangat, motivasi, serta selalu berjuang, dan mendoakan demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakakku tersayang Arantika Alfredha, S.Pd. dan Adikku tersayang Arantrizqi Ratu Alikha, yang selalu mendoakan demi keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Seluruh Keluarga Besar H. Muhammad Ali (Alm) dan Hj. Hamsinah (Almh). Serta Seluruh Keluarga Besar H. Khasan Anuar (Alm) dan Hj. Misnah Ariaah. Yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.
5. Sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) angkatan 2015, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

RIWAYAT HIDUP

Adjie Arvindo, lahir di Ketapang pada tanggal 29 April 1998. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang dilahirkan oleh seorang Ibu yang bernama Rahmawati dan Ayah yang bernama Alamsyah.

Pendidikan penulis dimulai pada SD Negeri Leping Tengah, Kecamatan Sungkai Jaya dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Sungkai Jaya dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 2 Kotabumi (Kampus Jalawiyata) selesai pada tahun 2015. *Alhamdulillah* pada tahun 2015 penulis dapat melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Bandar Lampung, Desember 2019

Yang Membuat,

Adjie Arvindo

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)**. *Shalawat* beriring salam kami semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Siyasa Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi, bantuan pemikiran, dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. dan Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah Bapak Frenki, M.Si.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. dan Pembimbing II Bapak Marwin, S.H., M.H. yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para Staf Karyawan Fakultas Syariah.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Kepala Desa Cahaya Makmur dan jajaran pengurus lainnya yang telah meluangkan waktunya dan kesediannya untuk penelitian skripsi ini.
8. Sahabatku TWELVE. Ali Khoironi, Estiyana, Gustian Ari Pranomo, M. Hardiansyah Kusuma, S.H., M. Saefuddin, Pratama Argo Putra, Rizki Setiawan, Wahyudi Rahmat, dan Witiar Pramudita. Yang telah memberikan motivasi dan semangat serta dukungan kepada penulis, semoga diberikan keberkahan dan kesuksesan. Aamin.
9. Untuksahabat IPS 1 angkatan 2015 SMA Negeri 2 Kotabumi, yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2015, khususnya kelas D yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaanya, canda dan tawa selama ini.
11. Kawan-kawan KKN kelompok 101 tahun 2018 desa Bangun Sari yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kenangan selama KKN.

12. Teman PPS Periode 2 tahun 2019 di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang selalu baik dan menyemangati.

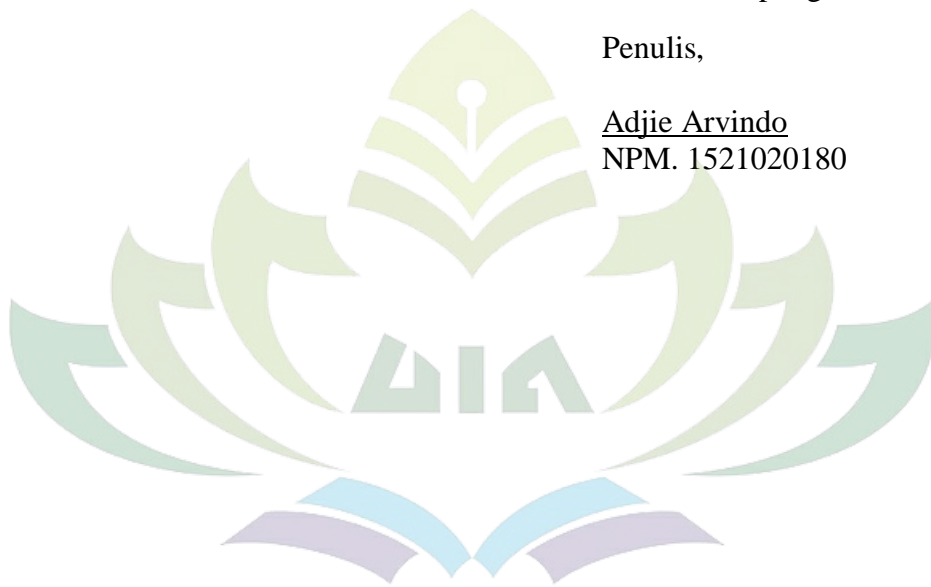
13. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Semoga Allah SWT. memberikan hidayah dan taufiqnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. *Aamiin Yarobal a'lam.*

Bandar Lampung, Desember 2019

Penulis,

Adjie Arvindo
NPM. 1521020180



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. PengesahanJudul.....	1
B. AlasanMemilihJudul.....	5
C. LatarBelakangMasalah	5
D. Fokus Penelitian	11
E. RumusanMasalah.....	11
F. TujuanPenelitian.....	12
G. Signifikasi Penelitian.....	12
H. MetodePenelitian	12
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	18
1. Pengertian Pemerintah dan Penyelenggaraan Pemerintahan.....	18
2. Sistem Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Desa.....	21
3. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	38
4. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	53
5. Bentuk-Bentuk Pemerintahan Dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	63
B. Penelitian Terdahulu.....	68
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
1. Kondisi Geografis.....	73
2. Kondisi Demografi.....	74
3. Sarana dan Prasarana.....	76

B. Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Cahaya Makmur.....	88
1. Struktur Desa.....	92
2. Pejabat Desa.....	93
3. Kebijakan Pemerintah Desa.....	95

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Desa Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintahan Desa Cahaya Makmur.....	98
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Kualitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Di Desa Cahaya Makmur.....	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Rekomendasi	107

DAFTAR PUSTAKA

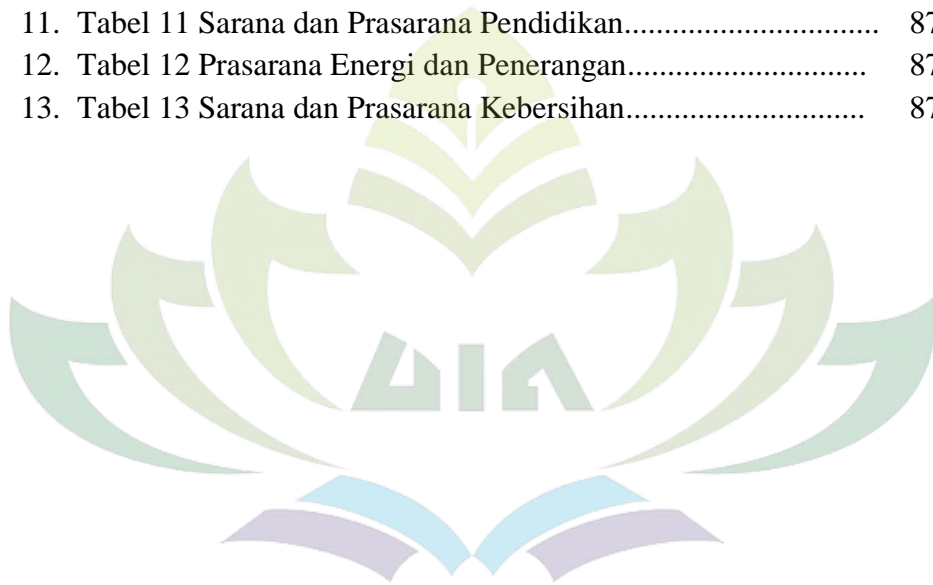
LAMPIRAN

Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Ragam Suku.....	75
2. Tabel 2 Mata Pencaharian Penduduk	75
3. Tabel 3 Sarana dan Prasarana Transportasi	76
4. Tabel 4 Prasarana dan Informasi	77
5. Tabel 5 Prasarana Air Bersih dan Sanitasi	78
6. Tabel 6 Sarana dan Prasarana Pemerintahan	89
7. Tabel 7 Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Desa ...	83
8. Tabel 8 Prasarana Peribadatan.....	86
9. Tabel 9 Prasarana Olahraga	86
10. Tabel 10 Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	86
11. Tabel 11 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	87
12. Tabel 12 Prasarana Energi dan Penerangan.....	87
13. Tabel 13 Sarana dan Prasarana Kebersihan.....	87



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Struktur Organisasi Desa 92



AB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”**. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan maka perlu adanya penegasan judul. Judul ini memiliki beberapa istilah sebagai berikut:

Fiqh siyasah sendiri berasal dari kata *fiqh* dan *siyasah*, *fiqh* adalah memahami dan mengetahui firman Allah dan sabda Rasulullah dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil yang terperinci.¹ Kata *siyasah* sendiri berasal dari kata *sasa*, yang dalam kamus *al-arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. *Fiqh siyasah* menurut ahli, yaitu Abdul Wahab Khallaf adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan serta terhindar dari kemudorotan, dengan tidak melanggar ketentuan *syari'at* dan prinsip-prinsipnya yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat imam mutjahid.² Secara umum *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik

¹Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo, 1998), h. 43

²J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran J. Sayuti Pulungan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 22 dan 24.

membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai ke-*mudharatan* yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.³

Implementasi yaitu pelaksanaan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah aturan yang mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban pemerintah desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan, desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Undang-Undang ini juga menegaskan pada Pasal 18 bahwa kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

³A. Dijazuli, *fiqih Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), h. 42.

⁴Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.⁵

Kewenangan desa adalah gabungan dua kata kewenangan dan desa, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁶ Berasal dari kata wewenang yang berarti kekuasaan membuat keputusan. Sedangkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁷ Jadi kewenangan desa dapat diartikan bahwa kewenangan desa merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri, serta kewenangan itu tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan, kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.⁸

Penyelenggaraan pemerintahan adalah segala bentuk pelaksanaan keputusan dan tindakan pemerintah berdasarkan proses, cara, dan perbuatan yang harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara.⁹

⁵*Ibid*, penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

⁶Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang". (Makalah Universitas Airlangga, Surabaya. Tanpa tahun, h. 1.

⁷*ibid*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

⁸M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2005), h. 12.

⁹Michael Barama, "Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22 No. 5, Januari 2016.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Desa Cahaya Makmur adalah sebuah desa yang terletak di Lampung, tepatnya Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Desa ini adalah desa pada umumnya (bukan desa adat), dimana memiliki karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh desa di Indonesia. Jarak tempuh yang perlu ditempuh lebih kurang 30 menit dari ibukota kabupaten dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Berdasarkan penegasan kalimat diatas maka yang dimaksud penulis dalam judul “Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)” adalah bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan penelitian di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

¹⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi peneliti untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, yaitu:

1. Alasan Objektif

Kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara kurang optimal, karena masih banyaknya masyarakat yang belum merasakan dampak positif kewenangan desa dalam penyelenggaraannya. Kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah seharusnya dapat berjalan dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Alasan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Tempat penelitian mudah dijangkau oleh peneliti.
- c. Pembahasan yang dipilih sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah Syar'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan dalam Islam adalah hal yang penting, sebab pemerintahan berperan penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, maka hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan terdapat didalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Konsentrasi politik dan ketatanegaraan sering kita sebut dengan *siyasah*, yang didalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berkaitan kehidupan

dalam bernegara, mengenai *dusturiyah*, *maliah*, dan *dauliyah*. Diantaranya adalah:

1. Surat *Al-Qur'an* tentang Pemerintahan

a. *Qur'an* Surat *an-Nisa* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisa [4]: 58).

b. *Qur'an* surat *an-Nisa* ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*al-Qur'an*) dan Rasul (*as-Sunnah*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4]: 58).

Berdasarkan Firman Allah diatas bisa kita uraikan bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk memimpin dimuka bumi, manusia diberikan kekuasaan untuk menerima amanah dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia. Untuk melaksanakan amanah maka diperlukan sebuah organisasi pemerintah yang terstruktur tugas-tugasnya, hal inilah yang membuat pentingnya ada

pemerintahan dalam Islam, dan tentunya dalam menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan syariat Islam.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Imam Al-Ghazali mengatakan agama dan negara merupakan dua hati yang tak terpisahkan. Jelas kalimat tersebut berarti bahwa pentingnya sebuah negara atau organisasi pemerintahan dalam menyeimbangkan sebuah agama yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Pendapat ulama lain oleh Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, juz 1 hal. 3. Yang berarti kepemimpinan(pemerintah) adalah pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia.

Terdapat banyak pendapat ahli terhadap prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dan penyelenggaraan negara dalam *Al-Quran* dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah:

1. Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak adalah milik Allah, kedaulatan tersebut dipraktikkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah dimuka bumi;
2. Keadilan, adalah kunci utama dalam menyelenggarakan kekuasaan. Keadilan dalam hukum menghendaki kesamaan kedudukan didepan hukum;

3. Musyawarah dan *ijma*, adalah proses pengambilan keputusan dalam urusan kemasyarakatan yang dilakukan secara konsensus dan konsultasi dengan semua pihak;
4. Persamaan, adalah persamaan perlakuan terhadap sesama manusia yang berdasarkan ketentuan Allah;
5. Hak dan kewajiban negara dan rakyat, semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Tentu negara dan rakyat memiliki kewajibannya masing-masing;
6. *Amar ma'ruf nahi munkar*, adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam.¹¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa telah menjadi daerah mandiri, dimana desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan akan menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan di desa. tentunya agar menjadi lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam hal kewenangan dalam penyelenggaraan

¹¹Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran”. *Petita*, Vol. 2 No. 1 (April 2017), h.55-59.

pemerintahan dikawasan perdesaan. Kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dan Pasal 24, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;
9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman; dan
11. Parsipatif.¹²

¹²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 23 dan 24

Lebih lanjut penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang disempurkan lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015, dan baru pada tahun 2019 ada perubahan kembali yang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dimana di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 33 Kewenangan Desa meliputi, a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. Kewenangan lokal berskala desa; c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota; d. Kewenangan lain yang diperintahkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.¹³ Serta hal yang berkaitan dengan kewenangan desa lebih terprinci lagi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewengan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, selain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.¹⁴

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 33.

¹⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan uraian diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”**.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan agar pembahasan mengenai penelitian ini tidak menyimpang atau melebar dari masalah yang ada dan lebih terarah. Untuk hal tersebut, maka penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Cahaya Makmur?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa di Desa Cahaya Makmur?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Cahaya Makmur.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewengan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

G. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi atau manfaat secara teoritis adalah suatu sumbangan pengetahuan atau ilmu kepada para pembaca agar bisa mengetahui permasalahan yang terdapat dalam *fiqh siyasah* terhadap Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.
2. Manfaat secara praktisnya adalah untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, ntuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁵

¹⁵ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*fieldresearch*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya.

Penelitian lapangan dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁶

b. Sifat Penelitian, Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

bersifat deskripsi analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁷

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁸ Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara kepada responden yang terdiri dari anggota perangkat desa dan masyarakat desa Cahaya Makmur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri.¹⁹

Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

¹⁶*Ibid*, h. 9.

¹⁷ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h. 126.

¹⁸ Mohammad Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57

¹⁹*Ibid*.,

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis mengamati objek-objek yang diteliti yang berada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²¹ Wawancara dilakukan guna menggali informasi mengenai bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepala desa Cahaya Makmur, sekretaris desa Cahaya Makmur, dan masyarakat desa Cahaya Makmur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²²

²⁰Soeranto. Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h.

²¹ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 107

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013, h. 198

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang kemudian untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan.²³ Populasi yang penulis tentukan dalam memperoleh data adalah aparat desa dan masyarakat desa Cahaya Makmur adalah 1908 orang.

b. Sampel

Teknik sampling adalah suatu teknik dalam pengambilan sampel pada suatu penelitian. Dengan begitu metode sampling merupakan cara yang dilakukan untuk menentukan dan menetapkan sampel yang ditentukan berdasarkan populasi yang ada. Teknik sampling ini adalah *purposive sampling* adalah sampel yang anggota sampelnya dipilih secara sengaja atas dasar pengetahuan dan keyakinan peneliti, peneliti percaya bahwa bahwa anggota sampel yang dipilihnya memenuhi kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁴

Dengan demikian peneliti mengambil sampel dari populasi yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan 3 orang aparat desa lainnya serta 5 orang masyarakat desa Cahaya Makmur. Dengan melakukan cara

²³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&B*, (Bandung, Alfabeta, 2013), h. 117.

²⁴Duri Andriani, dkk, *Metode Penelitian*, (Banten, Universitas Terbuka-Kementerian, Riset Teknologi, dan Pendidikan Ttinggi, 2017), h. 4.11.

ini maka dianggap cara yang paling tepat dalam menentukan sampel agar keobjektifan dari hasil penelitian dapat terjamin.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis melakukan penelitian dan mendapatkan data dilapangan, selanjutnya data tersebut diolah melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh guna menjamin data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai fakta.
- b. *Koding*, yaitu melakukan klasifikasi terhadap jawaban responden kedalam kategori-kategori atau memberikan tanda atau catatan yang memberikan sumber data atau urutan rumusan masalah.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna *meanings* (hakikat dan esensi). Selanjutnya metode berfikir deduktif yaitu berdasarkan pengeahuan yang berifat umum dan akan menilai kejadian yang khusus. Metode abakisis yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif yakni suatu prosedur dalam melakukan penelitian yang menghabiskan data baik tertulis atau lisan dari responden.

Metode penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk dalam menerangkan hasil penelitian yang sifatnya memaparkan dengan jelas tentang apa yang telah diperoleh di lapangan. Dengan melakukan menyusun dan memaparkan keadaan yang sistematis dan sesuai dengan teori yang ada, guna untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah tersebut.²⁵



²⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 34.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pemerintah dan Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Sedangkan pemerintahan adalah kata yang berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata perintah. Hal tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki ketaatan.²⁶

Secara etimologi pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyeluruh, penambahan awalan “pe” menjadi pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah, dan penambahan akhiran “an” menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari pada badan yang memerintah tersebut.²⁷

Menurut Wilson pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu perorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi, kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi

²⁶ Sirajudin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.206.

²⁷ *Ibid*, h.207.

untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut C.F. Strong pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karena harus memiliki kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, lalu harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, dan terakhir harus memiliki kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaran kepentingan negara.

Pada sebuah organisai pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good govrmance*) akan terwujud. Sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja kelembagaan di Indonesia. Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur didalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dengan

meningkatnya kinerja pemerintah berarti berarti tercapailah keinginan sebuah organisasi tersebut.²⁸

b. Penyelenggaraan Pemerintah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum.Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan pasal-pasal diatas, yang berprinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum.Oleh karena itu berdasarka prinsip tersebut, segala bentuk keputusan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebaga ideologi negara.²⁹

Tugas pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas, sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, guna memberikan landasan dan pedoman bagi

²⁸Rasyid Thaha, “Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah”. *Government: Jurnal I lmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1 (1 Januari 2009), h. 41.

²⁹Michael Barama, “Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22 No. 5, (Januari 2016), h. 28.

badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.³⁰

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap masyarakat, memungkinkan masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau pejabat pemerintahan atasan pejabat yang bersangkutan. Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan pemerintah.³¹

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara pada umumnya berpedoman pada peraturan, baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar beracuan pada peraturan perundang-undangan, yaitu berbagai bentuk peraturan yang memiliki kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berkaitan (berwenang). Tata urutan peraturan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berpijak dan berpedoman pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Sistem Pemerintahan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Desa

Perjalanannya perkembangan pemerintahan desa ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda hingga dengan lahirnya Undang-Undang

³⁰Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2014.

³¹Michael Barama, *Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah....*, h. 29.

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana didalamnya ada yang mengatur tentang desa.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan landasan Pasal 118 dan Pasal 128 IS (*Indische Staatsregeling*) yang menyatakan tentang wewenang warga masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala desa yang disukai sesuai dengan adat kebudayaan setempat daerah masing-masing. Pengaturan lebih lanjut dalam 160 B (*Inslansche Ordonnantie Buitengewesten*) I.N. 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 I.N. 1938 No. 681. Nama dan jenis persekutuan masyarakat asli ini adalah Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa dan Bali disebut desa. Sedangkan di bekas Karesidenan Palembang disebut Marga dan bekas Karesidenan Bangka Belitung disebut Haminte.³²

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, istilah penggunaan pemerintah marga terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut diatur dalam penjelasan angka II. Kemudian, pada tahun 1979 ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengatur desa dari segi pemerintahannya, berbeda dengan pemerintahan marga disamping mengatur pemerintahan juga mengatur adat istiadat.

Selanjutnya atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, dan perlunya mengakui dan menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa

³² Widjaya, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 118.

sehingga perlu diganti atau dicabut. Penggantian Undang-Undang ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana didalamnya ada yang mengatur tentang desa.

Pemerintah desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu, tujuan diembannya pemerintahan desa adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh pemerintah pusat, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam penyelenggaraan pemerintah yang terlihat dari aspek-aspek pengelolaannya, terdapat pembagian tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki masing-masing tingkat pemerintahan.³³

Pemerintahan desa adalah satu aspek sosio politik yang tak terpisahkan dari aspek-aspek lainnya dalam skala pembangunan di tanah air kita.³⁴ Pemerintahan desa juga sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintahan Republik Indonesia, yang berdasarkan asas dekonsentrasi (pelimpahan wewenang) ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.³⁵

³³Sugiman, "Pemerintahan Desa". *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1(Juli 2018), h. 83.

³⁴M. Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan di Daerah*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), h. 313.

³⁵Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 24.

Pemerintahan desa merupakan hal terpenting dalam suatu desa. pemerintah desa mengatur seluruh kepentingan masyarakat desa, termasuk dalam hal kewenangan. Dimana kewenangan tersebut bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan warga desa setempat. Seperti yang dijelaskan

Pasal 1: (2) Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Pasal 23: Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.³⁷

Pasal 25: Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.³⁸

Menurut Pasal 1, 23, dan 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatas, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa terdiri dari sekretariat desa yang dipimpin oleh sekretaris desa,

³⁶Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (2).

³⁷Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 23.

³⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 25.

pelaksana kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proposional, dan pelaksana teknis.³⁹

Pasal 26 : (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴⁰

Menurut pasal di atas, kepala desa merupakan bagian dari pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan tugasnya, kepala desa wajib untuk menyampaikan laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat desa secara tertulis.

Selain menyampaikan tugas, kepala desa juga mempunyai larangan dalam menjalankan jabatannya. Yaitu, kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat, melakukan korupsi, menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, ikut serta dalam kampanye pemilu kepala daerah, melanggar sumpah/janji jabatan, dan meninggalkan tugas selama 30 hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

³⁹Bambang Bambang, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*, (Bandar Lampung: Sai Wawai, 2016), h. 15.

⁴⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 ayat (1).

Pasal 33: Pada saat pencalonan kepala desa, warga haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu:⁴¹

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

⁴¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa, Pasal 33.

- bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan.

Calon kepala desa tersebut dipilih langsung oleh penduduk desa yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah dan dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemilihan tersebut haruslah bersifat jujur dan adil.

Ketika menjalankan jabatannya, kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dan didalam masa jabatannya tersebut kepala desa dapat juga berhenti dari jabatannya. Berhentinya kepala desa disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena meninggal dunia, permintaan sendiri, ataupun diberhentikan.

Kepala desa dapat diberhentikan karena beberapa sebab yaitu karena berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa, atau melanggar larangan sebagai kepala desa. Pemberhentian tersebut ditetapkan oleh bupati/walikota.

Kepala desa juga dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa itu sendiri terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksanaan

teknis.perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Setiap warga desa berhak untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa, dengan syarat berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum (SMU) atau yang sederajat, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun dan bertempat tinggal didesa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.

Adapun beberpa hal yang dapat menyebabkan perangkat desa berhenti pada masa jabatannya, yaitu karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pemberhentian perangkat desa tersebut ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Adapun sebab-sebab dari pemberhentian perangkat desa dikarenakan usianya telah genap 60 tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Selain kepala desa dan perangkat desa, didalam suatu desapun terdapat badan permusyawaratan desa (BPD). Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Masa keanggotaan badan permusyawaratan desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan paling banyak 3 kali menjabat secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 58: (1) Jumlah anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, dan kemampuan keuangan desa.

(2) Peresmian anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

(3) Anggota badan permusyawaratan desa sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Susunan kata sumpah/janji anggota badan permusyawaratan desa sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota badan permusyawaratan desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku

bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁴².

Jumlah anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pimpinan badan permusyawaratan desa terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih oleh anggota badan permusyawaratan desa secara langsung dalam rapat internal badan permusyawaratan desa yang diadakan secara khusus, dan rapat tersebut untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Selanjutnya tak kalah penting adalah lembaga kemasyarakatan desa (LKD), lembaga yang dibentuk berdasarkan prakarsa pemerintah dan masyarakat desa. Lembaga ini bertugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa.

⁴²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 58.

- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- g. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa.⁴³

Pasal 71: (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.⁴⁴

Desa saat menjalankan pemerintahan desa haruslah memiliki rancangan APBD. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan keuangan dan aset desa yang berupa uang dan barang. Pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.

⁴³Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 150.

⁴⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 71.

- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Alokasi APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Bagian hasil pajak ini paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan dana alokasi dana desa, pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar Alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang semestinya disalurkan kedesa. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. ADD (alokasi dana desa) yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 digunakan maksimal 60%, ADD (anggaran dana desa) Rp. 500.000.000,00 -Rp. 700.000.000,00 digunakan maksimal 50%, ADD Rp. 700.000.000,00 - Rp. 900.000.000,00 digunakan maksimal 40%, dan ADD diatas Rp. 900.000.000,00 digunakan maksimal 30%.
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.⁴⁵

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan intensif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Serta paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya serta tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa.⁴⁶

Dalam Undang-Undang juga terdapat hak dan kewajiban desa, hak dan kewajiban desa.⁴⁷

a. Hak desa adalah:

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan.

b. Kewajiban desa adalah:

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.

⁴⁵Bambang Bambang, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa....*, h. 15.

⁴⁶Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 100.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67-68.

- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Selain desa yang diatur harus memenuhi hak dan kewajibannya, masyarakatpun memiliki hak serta kewajibannya dalam sebuah desa.

a. Hak masyarakat adalah;

- 1) Menerima dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- 3) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 4) Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, anggota LKD.
- 5) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

b. Kewajiban masyarakat adalah:

- 1) Membangun diri dan memelihara lingkungan desa.

- 2) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.
- 3) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram didesa.
- 4) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan didesa.
- 5) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa.

Setelah melihat aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, unsur penyelenggara kewenangan diatas yang mempengaruhi baik buruknya kewenangan suatu desa. Selanjutnya pemerintah yang telah menerima amanah harus mengambil kewenangan dalam menjalankan pemerintahan, guna mewujudkan desa yang makmur dan sejahtera.

Pasal 18: kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa.⁴⁸

Desa dalam penyelenggaraan pemerintah harus sesuai dengan asas-asas, yang tercantum dalam:

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18.

Pasal 24: Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas:⁴⁹

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertip penyelenggaraan pemerintah;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

Dijelaskan lebih terperinci tentang kewenangan desa di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang kewenangan Desa.

Pasal 6: Jenis kewenangan desa:⁵⁰

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 14

⁵⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Pasal 6.

Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul antara lain, merupakan warisan sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan apabila hal tersebut masih sesuai dengan prinsip NKRI. Selanjutnya kriteria kewenangan lokal berskala desa adalah sesuai dengan kepentingan masyarakat desa tersebut, mampu dan efektif untuk dijalankan, muncul karena perkembangan dan prakarsa masyarakat desa, serta program yang telah diberikan kedesra.

Kriteria kewenangan yang telah diserahkan pemerintah yang lebih tinggi harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia didesa, memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas, meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat, juga meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa. Yang terakhir kriteria kewenangan lainnya yang ditugaskan pemerintah yang lebih tinggi adalah urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan, sesuai dengan prinsip efisiensi, mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, dan kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.⁵¹ Selanjutnya pemerintah desa memiliki tujuan untuk mencapai tujuan desa itu sendiri, dan tujuan itu antara lain:

- a. Dari segi politis bertujuan untuk menjaga tetap tegaknya dan utuhnya NKRI berdasarkan UUD 1945, yang berkontribusi dalam peraturan

⁵¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Pasal 7.

pemerintahan yang memberi peluang untuk masyarakat ikut serta dalam mekanisme pemerintahan dan pembangunan.

- b. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945 dan perundangan yang mengatur desa.
- c. Dari segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di desa, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Dari segi administrasi pemerintah yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menertibkan tata pemerintah agar dapat terselenggaranya dengan efektif, produktif, dan efisien dengan cara menerapkan prinsip-prinsip *rule of law* dan demokrasi.⁵²

3. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* ialah kalimat majemuk atau *tarkib idhafi* yang terdiri atas dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Pengertian secara etimologis, *fiqh* merupakan kata yang berbentuk *mashdar* dari sebuah tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam serta akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Arti secara terminologis, *fiqh* cenderung didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalil yang lebih terperinci.⁵³

Kata *fiqh* yang ditambah “*ya nisbah*”, gunanya ialah untuk menunjukkan suatu jenis. Secara etimologi, kata *fiqh* berasal dari sebuah

⁵²Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*..., h. 134.

⁵³Mujar Ibnu Syarif & Kamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), h. 2.

kata *fiqhan* yang merupakan *masdhar* dari kata *fi'ilmadhifaqihi* yang memiliki arti paham. Kata *fiqh* mempunyai arti paham atau memahami didukung oleh firman Allah:

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا
رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ ﴿٩١﴾

Artinya: "Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seseorang lemah diantara kami; kalau tidaklah karena keluarga kamu tentulah kami telah merajam kamu, sedangkan kamupun bukanlah seorang yang berwibawa disisi kami." (Q.S. Hud [11:91]).

Dalam *Al-Quran*, makna *fiqh* sebenarnya lebih lebih dekat pada makna ilmu, sebagaimana firman Allah:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (kemedan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan pada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (Q.S Al-Taubah[9]: 122).

Dari ayat yang disebutkan diatas, terlihat jelas bahwa pengertian kata *fiqh* lebih mengarah kesuatu ilmu pengetahuan agama yang memiliki sifat secara umum meliputi berbagai aspeknya. Sementara dari kajian *ushul al-fiqh*, *fiqh* dimaknai dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang memiliki sifat *amaliah* yang digali dari dalil-dalil yang lebih terperinci.

Pengertian ini menunjukkan bahwa *fiqh* adalah hasil *ijtihad* yang telah dilakukan oleh para ulama melalui kajian-kajian dalil tentang berbagai macam persoalan hukum, baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak secara langsung didalam *Al-Quran* dan *As-Sunnah*.⁵⁴

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁵⁵ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *al-arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁵⁶

Pengertian *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk dari pengaturan-pengaturan urusan umat manusia dan negara dengan berbagai bentuk hukum atau aturan. Hukum atau peraturan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri yang harus sesuai dan sejalan dengan dasar-dasar *syari'at* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

⁵⁴Toha Andiko, "Pemberdayaan *Qawa'id Fiqhiyyah* Dalam Penyelesaian Masalah Masalah Fikih *Siyasah Modern*", *Al-Adalah*, Vol. XII No. 1, Juni 2014, h.106.

⁵⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 3.

⁵⁶<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, (29 November 2019).

a. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Banyak pendapat ulama mengenai ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, para ulama membaginya menjadi beberapa bidang. Seperti pendapat Imam al-Mawardi, yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), serta *siyasah idariyyah* (administrasi negara).⁵⁷

b. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

Dilihat dari pengertiannya sudah dapat dimengerti bahwa sumber-sumber *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* merujuk dari nash-nash *Al-Quran dan Hadist*, yang merupakan acuan segala hukum Islam. *Al-Quran* dan *Hadis* merupakan sumber hukum pertama yang memuat prinsip-prinsip dasar untuk membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta untuk berbagai kondisi.⁵⁸

1) *Al-Quran*

Al-Quran sebagai kalam Allah Swt. yang merupakan wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada nabi Muhammad Saw. yang berbahasa arab dengan makna yang sudah pasti benar dan terjamin kebenarannya hingga akhir zaman. Agar menjadi *hujjah* bagi Rasulullah dalam pengakuannya sebagai rasul, juga sebagai undang-

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, h. 14.

⁵⁸ Hendri K, "Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam", *Al-Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015, h. 611.

undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal bila dibaca.⁵⁹ Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Quran) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4]: 59).

Perintah pada taatilah Allah dan amalkan isi kitabNya, selanjutnya taatilah Rasulullah, karena beliaulah yang menerangkan bagi setiap manusia semua apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dimana telah ditetapkan bahwa diantara manusia ada rasul yang akan menyampaikan *syari'at* Allah kepada umat manusia sehingga manusia wajib untuk menaati.⁶⁰

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yakni para umara, hakim, ulama, dan seluruh pemimpin yang menjadi tempat kembalinya manusia dalam kebutuhandan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka hal tersebut wajib diikuti atau ditaati. Hal yang harus diperhatikan, mereka harus bisa dipercaya

⁵⁹H. Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, h. 15.

⁶⁰Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V*, terjemahan Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), h. 119.

serta tidak menyalahi perintah Allah dan rasulNya, dan didalam pembahasan serta saat menyepakati tidak ada pihak yang memaksa dan merasa terpaksa. Bila terjadi perselishan dan tidak ada titik terang maka kembalikanlah kepada Allah (*quran*) dan Rasul (*sunnah*).

2) *As-Sunnah*

Selain *Al-Quran* yang dijadikan dasar hukum dalam *fiqh siyasah*, ada pula *sunnah* yang juga digunakan sebagai dasr hukum. *Sunnah* ialah hal-hal yang datangnya dari Rasulullah, baik hal tersebut ucapan, perbuatan, atau ketetapan beliau.⁶¹

c. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Dusturiyah bersal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.⁶²

Menurut istilah *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

⁶¹Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Dokrtrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 15.

⁶²<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, (27 November 2019).

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara, dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (undang-undang dasar negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶³

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai.⁶⁴

1) Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy* yang berisikan ayat-ayat *Al-Quran*

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, h. 77.

⁶⁴ <http://kreatif123.blogspot.co.id/201306/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html>, (01 Desember 2019).

maupun *As-Sunnah*, *maqashid al-shari'ah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil *ijtihad* para ulama yang disebut dengan *fiqh*.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Kata dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil bersal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh siyasah dusturiyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena didalamnya terdapat sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu negara. *Dusturiyah* dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan *dusturiyah* itu sendiri. *Dusturiyah* dalam konteks Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun sumber-sumber *fiqh dusturiyah* adalah sebagai berikut:

- a) *Al-Quran*, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran *al-Quran*.
- b) *Al-Hadist*, yaitu *hadist* yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. Di dalam menerapkan hukum dinegeri Arab.⁶⁵
- c) Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yaitu kebijakan pemimpin-pemimpin setelah Rasul wafat, walaupun mereka memiliki cara berbeda dalam gaya pemerintahan yang diterapkan namun, satu hal yang perlu diingat adalah semua dari mereka mengutamakan pada kemaslahatan umat atau rakyat.
- d) *Ijtihad* ulama, dalam masalah pemerintahan *ijtihad* ulama sangatlah penting dan membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*. Terlebih lagi perkembangan zaman membuat perlunya *ijtihad-ijtihat* para ulama untuk menentukan hal yang relevan pada zamannya.
- e) Adat dan Kebiasaan, tentunya adat dan kebiasaan yang tidak bertentang dengan *syariat*. Biasanya hal ini adalah hal yang tidak tertulis, atau yang sering disebut dengan istilah konvensi.⁶⁶

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, h. 53.

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, h. 53.

Khalaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah negara yang bersangkutan. Baik masyarakatnya, politik, maupun kebudayaannya, materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa. Dalam pembagiannya *fiqh siyasah dusturiah* dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu sebagai berikut:

- a) Bidang *siyasah tasyri'iyyah*, bidang yang termasuk dalam persoalan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat,

hubungan muslim dan non muslim didalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

- b) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan tentang *imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi*, dan lainnya.
- c) Bidang *siyasah qadlaiyyah*, yang didalamnya mengatur tentang masalah-masalah peradilan.
- d) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁶⁷

2) Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

- a) *Al-Quran* adalah sumber pokok aturan agama Islam yang dijadikan dasar dalam menemukan dan membuat hukum. Didalamnya merupakan kumpulan kalam Allah SWT. yang berisikan firman-firmanNya dalam beragam bentuk hukum didalamnya. Karena *al-Quran* diyakini berasal dari Allah SWT. dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.⁶⁸ Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya *al-Quran* merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena *al-Quran* tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berlanjut.

⁶⁷<https://www.suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html> (27 November 2019).

⁶⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*,h. 273.

- b) *As-Sunnah* secara harfiah adalah suatu praktik kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya, meliputi segenap ucapan dan tingkah laku serta ketetapan Rasulullah SAW. Proses periwayatan *sunnah* biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi kegenerasi sejak zaman Rasul hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan, dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁶⁹ Berikut contoh *sunnah* yang berkaitan dengan pemimpin:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَجْرِ بْنِ بَرِّي حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ
 فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya: “apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.” (H.R. Abu Daud No. 2241)

- c) *Ijma* (konsensus) dalam hukum Islam *ijma* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat, dengan melakukan musyawarah. Musyawarah

⁶⁹Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 53.

ini timbul dari pemikiran kalangan ulama *mufti*, ahli *fiqh*, maupun jajaran pemerintahan. Apabila dari musyawarah tersebut terdapat beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* tersebut dinyatakan batal.⁷⁰ Adapun dalil *al-Quran* yang menerangkan tentang *ijma*, yaitu sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah(*al-Qur’an*) dan Rasul(*as-Sunnah*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama(*bagimu*) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4]: 59).

d) *Qiyas* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁷¹ Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil *Quran* maupun

⁷⁰*Ibid*, h. 54.

⁷¹Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 56.

Hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *qiyas* terbagi menjadi dalam:

(1) *Qiyas al-Aulawi* adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dikekaskan dalam *al-Quran* atau *al-Hadist* tentang keharamannya melakukannya dalam jumlah sedikit, maka melakukan dalam jumlah banyak keharamannya lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang *mubah* atau diperbolehkan dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

(2) *Qiyas al-Mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini juga disebut dengan istilah *qiyasfi ma'na al-asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni *al-Quran* dan *as-Sunnah*, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan *illat*). Imam Syafi'i tidak menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan. "Ada ulama yang berpendapat seperti ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya". Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang memiliki persamaan *illat* pada

hukum cabang dan hukum *al-asal*. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mustashfa*. “Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada *nash* yang tersirat *illat* sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah”. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi ma’na al-asal*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyas* ini.

(3) *Qiyas al-Adna* adalah analogi yang *illat* pada hukum cabangnya (*far’*) lebih lemah daripada *illat* pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-Risalah*, Imam Syafi’i berkata, “sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian *qiyas*, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya.” Menurut Imam ar-Rizi, Imam Syafi’i telah membagi *qiyas* jenis kedua ini kedalam dua bagian, yakni *qiyas al-ma’na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas al-syaba* (analogi yang didasarkan kemiripan). Dalam kitab *Manaqib asy-Syafi’i* ia menegaskan adanya *illat* pada hukum cabang lebih lemah dari pada *illat* pada hukum *asal*.⁷²

⁷²Anjar Kurniawan, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. (Skripsi Program Strata Satu Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), h. 18.

4. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam *Fiqh Siyasah*

Menjalankan pemerintahan haruslah memiliki tata cara, tata cara tersebut haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan *syariat* Islam. Adapun tata cara pemerintahan yang sesuai dengan *syariat* Islam meliputi cara pemimpin dalam mengemban tugasnya dalam menjalankan kewenangan guna mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya, baik secara fisik material maupun kejiwaan (mental spritual). Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqh*, adapun dalam menjalankan kewenangan dalam pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan *syara'* menetapkan prinsip-prinsip *kulliyah*, yakni:⁷³

- a. Semua yang mengandung *mudharat* harus dijaui atau dihilangkan.
- b. Untuk menghilangkan serta menghindari hal *mudharat*, memiliki prinsip-prinsipnya pula, yakni: dalam menghilangkan hal *mudharat* tidak diperbolehkan menempuh *mudharat* yang serupa atau yang lebih berat dan dalam menghindari *mudharat* boleh dilakukan dengan *mudharat* khusus (ringan), dengan catatan tidak ada jalan lain yang menjadi solusi.
- c. Menghindari hal yang mengandung kerusakan lebih diutamakan daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak ke-*mudharatan*.
- d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang mendatangkan kesulitan hidup akan dihilangkan.

⁷³ Asmuni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h. 3-4.

Agama Islam adalah agama yang diberkahi dan dijamin kebenarannya, Islam juga adalah agama yang mengatur seluruh masalah kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat kelak. Termasuk didalamnya Islam mengatur tentang bagaimana dalam menjalankan suatu pemerintahan dan politik, *Al-Quran* dan *Sunnah* merupakan sebagai dasar hukum yang sudah mengatur dan menetapkan dasar dan prinsip-prinsipnya. Berikut adalah prinsip-prinsip pemerintahan dalam *fiqh siyasah*:

a. Prinsip Persatuan dan Kesatuan

Sebuah bangsa atau negara tidak akan mampu bertahan dan kokoh jika didalamnya tidak terdapat prinsip persatuan serta persaudaraan sesama warganya. Persatuan itu tidak juga terwujud jika tidak adanya kerja sama, setiap kelompok yang tidak terikat dengan kerja sama dan saling sayang tidak mungkin bersatu dalam satu prinsip untuk mencapai cita-cita bersama. Hal tersebut merupakan pondasi dan faktor terbentuknya negara yang kokoh.⁷⁴

Persatuan ini juga mengacu pada persaudaraan yang tidak memandang perbedaan. Sebagai contoh, hal ini telah diterapkan pada piagam Madinah, yang didalamnya menggambarkan bentuk hubungan antara golongan Islam dengan non Islam diberbagai aspek kehidupan. Hal tersebut yang harus diterapkan pada zaman modern ini guna menjadi negara yang makmur.⁷⁵

⁷⁴J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 142.

⁷⁵*Ibid*, h. 149.

b. Prinsip Kebebasan

Kebebasan adalah hak dasar dalam hidup yang dimiliki manusia, serta merupakan dari seseorang atau persamaan dan kemuliaan harkat martabat kemanusiaan orang lain. Sebuah kebebasan sangat dibutuhkan bagi manusia yang memang hidup ditengah masyarakat yang berbeda-beda baik secara etnis, agama, kultur, dan ekonomi. Jika kebebasan tidak diterapkan maka akan terjadi pergejolan antar satu golongan dengan golongan lain. Kebebasan akan membuat seseorang merasa eksistensinya dianggap dan diangkat serta dihargai harkat kemanusiaannya ditengah masyarakat.

Oleh sebab itu, kebebasan adalah hal mutlak dan perlu untuk dikembangkan serta dijamin oleh negara agar terlaksananya keutuhan masyarakat. Terdapat beberapa kebebasan-kebebasan yang diperlukan oleh setiap manusia, yakni: kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakaan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan dari penganiayaan, kebebasan bergerak, kebebasan memilih, dan sebagainya.⁷⁶

c. Prinsip Hidup Bertetangga

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, dalam kehidupan bertetangga tentu harus saling menghargai, tidak boleh saling menyusahkan terlebih lagi berbuat tindakan yang

⁷⁶*Ibid*, h. 156.

keji. Sebab, keharmonisan dari sebuah hubungan dalam bertetangga bisa menciptakan kesatuan dan persatuan masyarakat di sebuah negara.

Prinsip hidup bertetangga tidak boleh memandang sebuah perbedaan, manusia harus saling menghargai satu sama lain. Hal ini yang mendasari bahwa sifat hidup bertetangga adalah global, dimana tidak hanya mengatur antara tetangga di lingkungan masyarakat saja namun juga mengatur hidup bertetangga antar komunitas-komunitas yang berada atau tinggal diluar negara (*city-state*).⁷⁷

Pada sebuah catatan sejarah Islam, Rasulullah saat mengadakan sebuah perjanjian juga menjalin persahabatan dengan banyak komunitas yang berada diluar kota Madinah, yang juga menghormati hak mereka. Nabi juga menrapkan sikap cinta damai dan menjalin hubungan persahabatan dengan seluruh tetangganya yang hidup di Jazirah Arab.⁷⁸

Dalam suatu negara yang menerapkan prinsip ini akan tercipta sebuah ketertiban juga keamanan bersama, bukan hanya itu sealanjutnya membuat beberapa negara yang berdekatan saling menjalin hubungan kerja sama yang baik, tidak saling mengganggu, dan bahkan saling tolong menolong.

d. Prinsip Perdamaian

Untuk menguatkan solidaritas serta persatuan diperlukannya prinsip perdamaian bagi sebuah kelompok sosial (manusia), agar

⁷⁷*Ibid*, h. 187.

⁷⁸*Ibid*, h. 188.

terwujudnya hubungan kerja sama juga saling memberikan dampak positif satu sama lain. Dalam hubungan tokoh Al-Mududi mengatakan: “Muslimin dianjurkan hidup damai dan bersahabat. Bila golongan non Muslim memperlihatkan sikap bersahabat dan damai, muslimin juga harus bersikap demikian pada mereka. Berurusan secara jujur juga adil”.⁷⁹

Hal ini adalah suatu prinsip dalam Islam bahwa Allah SWT. melarang orang Islam terus bermusuhan terhadap musuh yang telah ingin berdamai dan menyerah. Sikap ini disebabkan agama Islam tidak memperbolehkan umatnya melanggar hak orang lain kecuali terhadap orang yang melanggar hak mereka, dan tidak pula memerangi mereka.

Pada masa nabi, ada praktik Nabi dan umat Islam yang telah melakukan perdamaian dengan pihak musuh non Muslim, misalnya dengan pihak kaum *musyrik* dan kaum Yahudi. Dengan pihak kaum *musyrik* dikenal dengan sebutan *shulh al-hudaibiyat* pada tahun 6 hijriah. Perjanjian tersebut didalamnya berisi perdamaian antara umat Islam dengan kaum *musyrik*.

Tidak berselang lama dengan perjanjian hudaibiah dengan kaum *musyrik*, Nabi kemudian menerima perdamaian dari pihak kaum Yahudi yang berada di Khaibar. Perdamaian ini terjadi setelah kalahnya kaum Yahudi Khaibar saat berperang dengan umat Islam. Sementara itu kaum Yahudi yang bermukim di Fadak, setelah mendengar kabar adanya kekalahan Yahudi Khaibar mereka segera membuat kesepakatan damai

⁷⁹*Ibid*, h. 204.

dengan cara menyerahkan setengah harta benda mereka tanpa terjadinya perang. Serupa halnya dengan kaum Yahudi yang menepati wilayah Taima, mereka menyerah sebelum terjadinya peperangan dan mereka bersedia membayar *jizyah* (pajak).⁸⁰

Melihat banyak sejarah diatas membuktikan perdamaian adalah hal yang penting, karena merupakan syarat utama terlaksananya hubungan yang baik antar kelompok-kelompok sosial disebuah negara. Bahkan dalam Islam perdamaian bersifat universal, tanpa batas, dan tanpa memandang perbedaan.

e. Prinsip Pelaksanaan Hukum

Sebuah pemerintahan haruslah berlaku adil jika memiliki kaitan dengan berbuat *ihsan* (kebaikan), dan harus melarang kemungkaran juga permusuhan serta kejahatan. Karena hal ini dilakukan untuk keadilan yang ingin dicapai, melaksanakan kebaikan itu juga berarti memenuhi hukum-hukum yang berlaku. Jika hukum telah diterapkan dengan baik, maka keadilan akan terpenuhi.

Aktivitas hidup manusia dalam *Al-Quran* dituntun untuk melaksanakan keadilan baik tentang imbang maupun takaran. Untuk bersikap adil maka harus melakukan dengan jujur tanpa melakukan kecurangan, tak diperkenankan untuk mengurangi timbangan atau takaran sedikitpun. Karena itu berkaitan dengan hak orang lain, hal ini

⁸⁰ *Ibid*, h. 208.

bertujuan untuk tidak terjadinya salah paham dan prasangka buruk orang lain terhadapnya.⁸¹

Dalam kehidupan sosial hingga politik, umat Muslim diperintahkan supaya mendamaikan dua kelompok mukmin yang berselisih secara adil dan mengembalikan hak mereka secara adil. Umat Muslim juga diperintahkan agar berlaku adil dan baik, serta memberikan apa yang menjadi hak dan bagian kaum non Muslim yang tidak memerangi dan mengusir mereka karena alasan agama, karena Allah SWT. menyukain orang-orang yang berperilaku adil.⁸²

f. Prinsip Kepemimpinan

Seorang pemimpin atau *ulil amri* adalah hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam suatu kelompok, agar kehidupan kelompok bisa berjalan dengan seharusnya. Sebagai contoh, jika dalam suatu kelompok terjadi perselisihan antar anggota kelompok maka pemimpin diperlukan untuk mendamaikan mereka. Pemimpin bertugas sebagai pemegang kekuasaan dalam hal pemerintahan juga berperan sebagai contoh, sehingga pemimpin seharusnya adalah orang yang kompeten.

g. Prinsip *Amar Makruf* dan *Nahi Munkar*

Lembaga pemerintah atau seorang pemerintah diwajibkan untuk memiliki rasa peduli sosial yang tinggi, baik dalam menjalankan tugas *amar makruf* ataupun *nahi munkar*. Hal ini untuk mewujudkan

⁸¹*Ibid*, h. 229.

⁸²*Ibid*, h. 230.

kemaslahatan umat, jika terwujud maka pemerintahan dan masyarakat tersebut telah bergerak di jalan yang *diridhoi* Allah SWT.⁸³

Seorang muslim wajib baginya melakukan dan mengajak muslim lainnya untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan *munkar*. Seperti Firman Allah berikut ini:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: *"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."* (Q.S. Ali Imran [3]: 110).

Ayat diatas menunjukkan kewajiban umat Islamsaling menyerukan kebaikan dan salin mencegah perbuatan *munkar*.Prinsip *amar makruf nahi munkar* harus diterapkan sebagai prinsip negara yang dijalankan secara konsekuen.Agar sebuah negara berjalan dengan semestinya dengan melakukan kebaikan sebagai cerminan dari *ketaqwaan*.

h. Prinsip Musyawarah

Islam sangat menganjurkan musyawarah sebagai unsur dari sebuah pemerintahan negara Islam.Musyawah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan mulai dari penguasa hingga masyarakat

⁸³ *Ibid*,h. 262.

biasa.⁸⁴ Nabi Muhammad SAW. adalah teladan yang telah menjalankan praktik musyawarah bersama para sahabat. Seperti dalam persoalan ketatanegaraan dan kemasyarakatan Rosul sering kali meminta pendapat para sahabat dengan melakukan musyawarah.

Saat Rosul membawa berita bahwa kaum Quraisy telah meninggalkan kota Makkah untuk berperang melawan kaum muslimin, Beliau belum menentukan sikap kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Karenanya, Nabi melakukan musyawarah untuk membahas tentang belanja perang dan berapa jumlah pasukan yang akan ikut serta. Sehingga Beliau mendapatkan persetujuan dari kaum Ansar dan mereka bersedia mengorbankan segalanya.⁸⁵

Tidak melakukan musyawarah merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang tidak dibenarkan. Itu menunjukkan bahwa Allah SWT. menghendaki politik kaum muslimin ini berjalan berdasarkan prinsip musyawarah, agar tidak seorangpun merasa dirugikan.⁸⁶

i. Prinsip Berlaku Adil

Keadilan merupakan dasar dari kewenangan dan pilar sebuah negara. Pemerintah dan pemimpin dibebankan agar tetap berlaku adil. Seperti dalam Firman Allah SWT.:

⁸⁴Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 52.

⁸⁵J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran....*, h. 209.

⁸⁶*Ibid*, h. 59.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.*” (Q.S. An-Nisa [4]: 58).

Ayat yang turun prihal pemimpin atau *ulil amri* ini menerangkan bahwa mereka harus menyampaikan amanak kepada orang yang berhak menerimanya, hal tersebut adalah perkara umum yang harus dilaksanakan para pemimpin.Untuk menetapkan hukum atau peraturan harus berdasarkan keadilan, keimpulannya bahwa tujuan penguasa atau pemerintah adalah memberikan pada yang berhak menerima.⁸⁷

j. Prinsip Persamaan

Al-Quran telah menyebutkan mengenai persamaan hak, Islam tidak mengenal perbedaan yang menjadi tolak ukur.Sebab kebijaksanaan Allah telah memutuskan bahwa maksud perbedaan ini adalah untuk saling mengenal dan saling membantu antar umat dan bangsa. Allah SWT.⁸⁸

Berfirman:

⁸⁷*Ibid*,h. 202.

⁸⁸*Ibid*, h. 222.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling muliadiantara kamu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13)

Hal yang menjadi tolak ukur adalah *taqwa*. Sikap *taqwa* terhadap Allah diantaranya adaah berlaku adil dan selalu berbuat baik sesama manusia. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, juga tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Semua sama disisi Allah SWT.

5. Bentuk-Bentuk Pemerintahan Dalam *Fiqh Siyasa*

Islam dalam mempraktikkan pemerintahan sangat terkait kondisi konstektual yang dialami oleh masing-masing umat. Semenjak abad ke-7 Masehi, dengan jangka waktu tersebut hingga saat ini, umat Islam pernah mempraktikkan beberapa sisitem pemerintahan yang meliputi system pemerintahan *khalifah* (*khalifah* berdasarkan *syura* dan *khalifah* monarki), *imamah*, monarki dan demokrasi.⁸⁹

Negara Madinah adalah awal mula pemerintahan Islam mulai terbentuk dan maju. Terbentuknya negara Madinah akibat dari perkembangan Islam menjadi kelompok sosial yang memiliki kekuatan

⁸⁹Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 198.

nyata, Nabi sendiri yang menjadi pemimpin atau kepala masyarakat yang baru terbentuk itu yang akhirnya merupakan suatu negara. Praktik pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak berpusat pada diri beliau sendiri, dimana dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi. Yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun walaupun pada saat itu belum mengenal teori pemisahan kekuasaan dipraktiknya Nabi memberikan tugas-tugas legislatif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.⁹⁰ Nabi juga menunjuk sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai *katib* (sekretaris), *'amil* (pengelola zakat), dan *qadhi* (sebagai hakim), serta memerintah wali untuk di daerah-daerah.

Dilihat dari sejarah Rasul dalam menjalankan pemerintahan, ternyata pembagian tugas dalam menjalankan sebuah pemerintahan telah dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dari penunjukan para sahabat yang cakap sebagai pembantu Rasul, selain itu dalam mengambil keputusan kenegaraan juga dilaksanakan dengan bermusyawarah.

1. *Khalifah*

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh wilayah teritorial, sehingga ke-*khalifah*-an Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan ke-*khalifah*-an adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khalifah* adalah kepemimpinan umum yang

⁹⁰Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 88-90.

mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Ibn Khaldun, ke-*khalifah*-an adalah kepemimpinan umum bagi kaum Muslimin diseluruh penjuru dunia untuk menegakkan hukum-hukum atau aturan syari'at Islam dan memikul dakwah Islam keseluruh dunia. Menegakkan *khalifah* adalah kewajiban bagi seluruh kaum Muslim diseluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah SWT. bagi setiap kaum Muslimin.

Berdasarkan *ijma'* sahabat, wajib hukumnya mendirikan ke-*khalifah*-an. Setelah Rasulullah SAW. wafat, mereka sepakat untuk mendirikan kekhalifahan untuk Abu Bakar, kemudian Umar, Ustman dan Ali, sesudah masing-masing dari ketiganya wafat.⁹¹ Para sahabat telah bersepakat sepanjang hidup mereka atas kewajiban untuk mendirikan *khalifah*, meski mereka berbeda pendapat tentang orang yang akan dipilih sebagai khalifah, tetapi mereka tidak berbeda pendapat secara mutlak mengenai berdirinya *khalifah*.⁹²

2. *Khalifah* Berdasarkan *Syura*

Pemerintahan Islam berdasarkan *syura* pernah dipraktikkan pada masa al-Khulafa al-Rasyidun, ketika mereka memerintah Islam di beberapa kawasan yang didasarkan pada sistem musyawarah sebagai paradigma dasar kekuasaan. Abu Bakar Al-Shiddiq, Umar bin al-Khattab,

⁹¹Samis Athief az-Zain, *Syari'at Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial Sebagai Studi Perbandingan*, (Bandung: Husaini, 1988), h. 18-19.

⁹²*Ibid.*, h. 19-20.

Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib telah menjalankan sistem pemerintahan yang dilandasi oleh semangat musyawarah.

Ciri-ciri yang menonjol dari sistem pemerintahan yang mereka jalankan terletak pada mekanisme musyawarah, bukan dengan sistem keturunan. Tidak ada satupun dari empat *khalifah* tersebut yang menurunkan kekuasaannya kepada sanak kerabatnya. Musyawarah menjadi jalan yang ditempuh dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan apa yang dijalankan Rasulullah SAW.

3. *Khalifah* Monarki

Pasca berakhirnya al-Khulafa al-Rasyidun, kekhalifahan dilanjutkan oleh *khalifah* bani Umaiyah dengan Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai *khalifah* pertama. Sejak saat itulah *khilafah* Islamiyah yang sudah berdasarkan syura digantikan dengan sistem keturunan, menjadi negara kerajaan (monarki) mengikuti sistem yang diperlakukan di Persia dan Romawi.⁹³

Monarki adalah sistem waris (putra mahkota), dimana kekuasaan kerajaan akan diwarisi oleh putra mahkota dari orang tuanya (raja). Sistem monarki juga merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan raja sebagai sentral kekuasaan, seorang raja berhak menetapkan aturan bagi rakyatnya. Perkataan raja adalah undang-undang tertinggi yang harus ditaati. Raja memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh rakyat, raja

⁹³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI, 1990), h. 27.

memiliki kekebalan terhadap hukum, dan kekuasaan kenegaraanya tak terbatas.

4. *Imamah*

Kunci utama *imamah* dalam politik Syi'ah adalah terletak pada posisi imam. Karena status politik dari para imam adalah bagian yang esensial dalam *mazhab* Syi'ah *imamiyah*. Mereka dianggap penerus yang dari nabi Muhammad SAW. dan mereka percaya bahwa setiap penerus harus ditunjuk oleh Allah SWT. melalui nabinya. Para Imam dianggap sebagai penerus nabi dan pewaris yang sah dari otoritasnya. Hal ini bukan dikarenakan mereka dari keluarganya, tetapi karena mereka merupakan orang-orang yang shaleh taat kepada Allah dan mempunyai karakteristik yang menjadi prasyarat untuk mengemban tingkat kepemimpinan politik agama, demikian juga mereka tidak ditunjuk melalui consensus rakyat.

Imamah adalah institusi yang dilantik secara *ilahiyah*, hanya Allah yang paling tau kualitas-kualitas yang diperlukan untuk memenuhi tugas ini, oleh karena itu hanya Allah yang mampu menunjuk mereka. Syi'ah menganggap bahwa *imamah* seperti kenabian, menjadi kepercayaan yang fundamental, dan ketaatan kepada otoritas imam adalah sebuah kewajiban agama. Meski para imam tidak menerima wahyu Ilahi, namun para imam mempunyai kualitas, tugas, dan otoritas dari Nabi. Bimbingan politik dan agama dari mereka dan mereka adalah wali bagi pengikut mereka.⁹⁴

⁹⁴ Ahmad Vaezi, *Agama politik Nalar Politik Islam*, (Jakarta: Citra, 2006), h. 66-67.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis menyadari bahwa secara substansial penelitian yang diteliti ini bukan hal yang baru. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul “Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”. Adapun beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis oleh penulis lain adalah sebagai berikut:

Kushandajani, dalam jurnalnya yang berjudul “Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa”. Karya ilmiah tersebut mengambil studi di Desa Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dan Desa Trajumas, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Jurnal ini membahas kewenangan desa yang lebih fokus pada hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, dimana peneliti fokus melihat kondisi desa dalam menyelenggarakan desanya sesuai tempat desa an budaya desanya.⁹⁵

La ode Dedihasriadi S.H., M.H. dan Andi Novita Mudriani djaoe S.H., M.H., dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sabi Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur”. Fokus penelitian jurnal ini pada penyelenggaraan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁹⁵ Kushandajani, “Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa”, *Yustisia*, Vol. 4, No. 2, Mei-Agustus 2015, h. 393.

Tentang Desa, karena pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat di desa dan juga menjadi tolak ukur untuk semua program yang dijalankan oleh pemerintah desa.⁹⁶

Kushandajani, dalam jurnal yang berjudul “Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Fokus penelitian karya ilmiah ini memberikan implikasi yang luas bagi tata kehidupan masyarakat, utamanya pada kewenangan desa, dan pemerintahan desa. Implikasi terhadap kewenangan desa menunjukkan bahwa otonomi desa tetap eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan wewenang hak asal-usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa dan sinkronisasi kewenangan desa dan struktur pemerintahan desa dari dua ranah, ranah lokal dan ranah peraturan perundang-undangan.⁹⁷

Setelah melihat ketiga karya ilmiah di atas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini, yaitu karya ilmiah ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa, bagaimana penyelenggaraan kewenangan desa di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Selain pada penyelenggaraan kewenangan desa, karya ilmiah ini juga melihat dari *perspektif fiqh siyasah dusturiyah*.

⁹⁶ La ode Dediasriadi dan Andi Novita Mudriani Djaoe, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sabi Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11, No. 1, Januari 2018, h. 29.

⁹⁷ Kushandajani, “Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Maret 2016, h. 54.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkhadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ali, Daud, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Az-Zain, Samis Athief, *Syariat Islam Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik, dan Sosial Sebagai Studi Perbandingan*, Bandung, 1988.
- Bambang, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa*, Bandar Lampung; Sai Wawai, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleena, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Premanada Media, 2000.
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Jindan, Ibrahim Khalid, *Teori Politik Politik Islam: Telaah Krisis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Lubis, M Solly, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Didaerah*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Ndraha, Ttaliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Pabunda, Mohammad Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Pulungan, J Sayuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*, Jakarta: PT, Grafindo Raja Persada, 1994.
- , *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Pemikiran J. Sayuti Pulungan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahman, Asmuni A, *Metode Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.

- Silahuiddin, M, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Sirajudin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasimy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sjadzli, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI, 1990.
- Soeranto, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan D&B*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Sutrisno, Hadi, *Metodelogi Research I*, Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM, 1985.
- Syarif, Mujar Ibnu, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Vaezi, Ahmad, *Agama Politik Nalar Politik Islam*, Jakarta: Citra, 2006.
- Wibawa, Samodra, *Administrasi Negara: Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Widjaya, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Jurnal

- Andika, Toha, Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqh Siyasah Modern, *Al-Adalah*, Vol. XII No. 1, Juni 2014.
- Barama, Michael, Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Peraturan Daerah, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22 No. 5, Januari 2016.
- K, Hendri, Pemikiran Muhammad Iqbal dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam, *Al-Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015.
- Kushandajani, "Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Maret 2016.
- Kushandajani, "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa", *Yustisia*, Vol. 4, No. 2, Mei-Agustus 2015.

La ode Dedihasriadi dan Andi Novita Mudriani Djaoe, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sabi Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11, No. 1, Januari 2018.

Mutiara, Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran, *Jurnal Petita*, Vol. 2 No. 1, April 2017.

Sugiman, Pemerintahan Desa, *Bina Mulya Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018.

Thaha, Rasyid, Penataan Kelembagaan Daerah, *Govermen: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1, Januari 2009.

Wawancara

Abraham Habi Sujana, wawancara dengan penulis, Lampung Utara, 11 Desember 2019.

Alamsyah, wawancara dengan penulis, Lampung Utara, 10 Desember 2019.

Bilaludin, wawancara dengan penulis, Lampung Utara, 11 Desember 2019.

Dodi, wawancara dengan penulis, Lampung Utara, 11 Desember 2019.

Edi Gunawan, wawancara dengan penulis, Lampung Utara, 11 Desember 2019.

Rahmawati, wawancara dengan penulis, Lampung Utara, 10 Desember 2019.

Yadi Wijaya, wawancara dengan penulis, Lampung Utara, 11 Desember 2019.

Profil Desa Cahaya Makmur Tahun 2019.

Sumber on-line

Nur Rohman, “Ruang Lingkup Fiqh Siyasah”. (on-line), tersedia di: <https://kreatif123.blogspot.com/2013/06/ruan-lingkup-fiqh-siyasah.html> (1 Desember 2019).

Sudut Hukum, “Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah”. (on-line), tersedia di: <https://www.suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html> (27 November 2019).

Syifaul Qulub, “Kajian Fiqh Siyasah Tentang Konsep Siyasah Dusturiyah”. (on-line) tersedia di: <https://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html> (29 November 2019).

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

